BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

Kabupaten Banjar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dengan Ibu Kota Kabupaten adalah Martapura . Luas daerah Kabupaten Banjar sekitar 4688 km², dengan batas wilayah barat yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin, batas timur dengan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, batas Selatan dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut, dan batas Utara dengan Kabupaten Hulu Sunagi Selatan dan Kabupaten Tapin. Menurut data Badan Pusat Statistik terbaru per-2024, jumlah penduduk Kabupaten Banjar tercatat sekitar 584,68 ribu jiwa¹ yang mana jumlah ini menjadikan Kabupaten Banjar sebagai salah satu kabupaten dengan populasi terbesar di Kalimantan Selatan.

Saat ini Kabupaten Banjar dipimpin oleh Bupati H. Saidi Mansyur, S.I.Kom dan Wakil Bupati H. Said Idrus al-Habsyi dengan semboyan “ Barakat” yang berarti berkat. Visi dari Pemerintah Kabupaten Banjar adalah “Terwujudnya Kabupaten Banjar yang maju, Mandiri dan Agamis”. Visi Agamis dari Kabupaten Banjar ini tentunya tercermin dari latar belakang Kota Martapura yang menjadi pusat pendidikan Islam terbesar di Kalimantan Selatan, bahkan di Kalimantan. Terdapat banyak pondok pesantren di Kabupaten Banjar, berdasarkan data Kementerian Agama Kalimantan Selatan terdapat 39 Pondok Pesantren yang terdaftar di

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, *Kabupaten Banjar Dalam Angka Banjar Regency in Figures*, (Kabupaten Banjar: CV. Karya Bintang Musim, 2024) hlm. 49.

Kemenag, dan masih banyak lagi diluar data tersebut yang belum terdaftar.² Salah satu pondok terkenal di Kabupaten Banjar adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang telah melahirkan banyak ulama besar dan tokoh agama terkemuka.

Kehidupan keagamaan sangat hidup di tengah masyarakat dengan banyaknya majelis taklim yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar, khususnya di Kota Martapura. Majelis-majelis ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengkaji dan mendalami ajaran agama serta mempererat tali silaturahmi. Banyak ulama besar berasal dari Kota Martapura, hal ini menjadikan Ulama memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Banjar, fatwa dan nasihat ulama sangat dihormati dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu tradisi keagamaan Islam di Kabupaten Banjar juga sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya perayaan hari besar keagamaan dan kegiatan lain sebagaimana haul ulama dan lain-lain.

Kuatnya peran ulama dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Banjar menjadikan pemahaman masyarakat mengenai hukum Islam juga sangat bergantung kepada pandangan ulama yang ada di sekitar mereka, dalam proses penyebaran pengetahuan apa yang di pahami masyarakat dapat di pengaruhi banyak faktor baik kapasitas individu penerima, maupun akses terhadap pengetahuan itu sendiri. Hal ini kemudian dapat memungkinkan beberapa persoalan hukum Islam tidak di pahami secara menyeluruh di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat memicu konflik sosial. Sebagaimana halnya dalam persoalan yang penulis angkat, bahwa dalam hal pembebanan utang mayit kepada ahli waris, ahli waris

²<https://kalsel.kemenag.go.id> di akses pada 3 juli 2025, 12.00 wita.

menyatakan bahwa hukum menanggung utang mayit bukanlah merupakan kewajiban mereka, di sisi lain hal ini menjadi permasalahan bagi pihak pemberi utang yang menuntut pengembalian dari apa yang menjadi haknya kepada ahli waris. Hal inilah yang kemudian menjadi target dari penelitian yang penulis lakukan kepada lima orang Ulama Kabupaten Banjar.

Berikut hasil wawancara penulis kepada lima orang Ulama Kabupaten Banjar yang penulis jadikan sebagai narasumber dalam penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Biodata Informan

Nama	: Guru. H. Karimul Ulya
Umur	: 47 tahun
Alamat	: Komplek Graha Anjung Mahatama, Blok 5, No.127, Kel.Sungai Sipai, Martapura
Pendidikan Terakhir	: D3 Ma'had Aly Darussalam Martapura
Pekerjaan	: Pengajar <ul style="list-style-type: none"> - Pengajar Ma'had Aly Darussalam Martapura - Pengajar Ponpes Darul Ulum Kel. Keraton, Martapura - Pengajar Ponpes Nurul Ma'ad Landasan Ulin, Banjarbaru
Forum Kajian	: Majelis Taklim

- Majelis Taklim Tafaqquh Fiddien, Komp. Graha Anjung Mahatama, Sungai Sipai
- Majelis Taklim Darul Muna, Sungai Sipai
- Kajian Rutin Masjid Kanzul Khairat Banjarbaru
- Kajian Kitab Sabilal Muhtadin di Kemenag Kab.Banjar

Kitab Yang di Kaji : Fikih

- Fathul Mu'in Karya Syekh Zainuddin al-Malibari
- Al-Kanzu ar-Raghibin Karya Imam Jalaluddin al-Mahalli
- I'anatu ath-Thalibin Karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho ad-Dimyathi
- Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

Organisasi Keislaman : Ketua Lembaga Bahtsul Masail NU Kab. Banjar

b. Hasil Wawancara

Persoalan utang merupakan sesuatu yang penting untuk diselesaikan, karena membayar utang adalah merupakan suatu kewajiban, adapun mengenai seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang, Guru H. Karimul Ulya berpendapat bahwa orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang tetap wajib membayar utangnya tersebut, pandangan beliau di dasari pada penjelasan Imam al-Mawardi dalam Kitab *Al-Hawiy al-Kabir* Juz 6 halaman 454 yang berpendapat bahwa utang seseorang tidaklah gugur disebabkan kematiannya baik

orang tersebut memiliki harta maupun tidak untuk membayarnya. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i dikatakan bahwa utang mayit tidaklah jatuh dikarenakan ketiadaan harta, dan yang kedua bahwa ada kebolehan menanggung utang mayit. Dalil dari pandangan ini ialah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa jiwa orang yang meninggal dunia tertahan karena utangnya sampai (utang tersebut) dilunasi.

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُفْضَى عَنْهُ

“Jiwa (ruh) seorang mukmin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi”.³

Disisi lain Guru H. Karimul Ulya juga menjelaskan bahwa apabila seseorang ketika semasa hidupnya memiliki utang namun ia benar-benar tidak memiliki harta untuk membayarnya, akan tetapi di dalam hatinya tertanam tekad yang kuat dengan niat ingin membayar utang-utangnya, maka dalam hal demikian utang tersebut tidak akan menjadi persoalan di alam akhirat dikarenakan Allah Swt yang akan menanggungnya. Beliau menyampaikan pandangan tersebut dengan mengutip pendapat di dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adilatuhi* Juz 2 halaman 1482 yang mana dalam kitab tersebut disampaikan hadis Rasulullah Saw, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abi Umamah:

مَنْ دَانَ بِدَيْنٍ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ وَمَاتَ تَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ وَمَنْ دَانَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ وَمَاتَ إِقْتَصَرَ اللَّهُ لِعَرِيمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang berutang dan didalam dirinya terdapat niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal dunia, maka Allah Swt akan mengampuninya dan meridhainya dengan apa yang Allah Swt kehendaki”.⁴

³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah, Edisi Indonesia* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Buku 2, Cet.1, hal.406.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhi* (Damaskus: Darul Fikr, 1418 H) Juz 2 halaman 1482.

Dalam kondisi normal dimana seseorang meninggalkan harta setelah kematiannya, Guru H. Karimul Ulya menjelaskan sebagaimana penjelasan dalam Kitab *Al-Fiqh al-Minhaji* Juz 5 halaman 72, bahwa terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab wali mayit atau ahli waris terkait harta peninggalan mayit sesuai dengan urutannya yaitu penyelenggaraan jenazah, penyelesaian utang (baik utang kepada Allah Swt, maupun kepada manusia), menunaikan wasiat, hak ahli waris.

Menyambung penjelasannya dalam hal mengurus utang mayit Guru H. Karimul Ulya berpendapat dengan mengutip penjelasan pada Kitab *Mughni al-Muhtaj*, bahwa di sunahkan untuk bersegera mengurus utang mayit jika mudah untuk dilakukan sebelum mengurus penyelenggaraan jenazah, hal ini dikarenakan agar jiwa mayit segera terbebas dari belenggu dan dapat segera menuju tempat yang mulia. Jika hal tersebut tidak mudah untuk dilakukan maka walinya di anjurkan untuk meminta keringanan waktu kepada pemberi utang sebagaimana yang telah di sampaikan dalam Mazhab Syafi'i.⁵

Dalam hal mayit meninggalkan harta namun tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau bahkan ketika mayit tidak meninggalkan harta sekalipun, maka tanggung jawab ahli waris dalam menyelesaikan persoalan utang mayit hanya terbatas pada jumlah harta peninggalan yang dimiliki, dan mengusahakan untuk meminta pembebasan utang terhadap mayit tersebut kepada pemberi utang.

Adapun mengenai bagaimana hukum jika ahli waris atas kesadaran dan kehendak pribadinya melakukan penanggungan terhadap utang mayit, maka hal

⁵Al-Khatib as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1415 H) Juz 2, hal.44.

tersebut hukumnya adalah sunah, yang artinya bukan merupakan kewajiban bagi ahli waris. Tindakan yang demikian merupakan suatu kebaikan dan sah untuk dilakukan, status utang mayit tersebut kemudian dapat dinyatakan lunas. Pendapat beliau disampaikan dengan menjelaskan pandangan ulama dalam Kitab *Syarah Nawawi ala Muslim* Juz 11 halaman 84, *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 137-138, dan *I'anat ath-Thalibin* Juz 3 halaman 22, Alasan hukum demikian di dasari pada ketentuan bahwa seseorang tidak berkewajiban menanggung utang orang lain semasa hidup, maka demikian pula jika dalam keadaan meninggal dunia. Secara pribadi beliau menambahkan bahwa jika kedudukan ahli waris dalam persoalan ini sebagai anak dari mayit maka sangat dianjurkan sekali jika ahli waris tersebut berkenan menanggung utang orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

Jika memandang permasalahan ini dalam konteks keadilan hukum bagi pemberi utang, maka beliau berpendapat bahwa apabila memang tidak dapat di selesaikan secara sosial maka pemberi utang dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut ahli waris, akan tetapi jika memang hal tersebut sulit untuk dilakukan, baik karena status utang yang tidak jelas karena tidak ada saksi atau bukti tertulis maka beliau menegaskan bahwa sesungguhnya Allah.Swt merupakan Dzat yang Maha Adil, jika memang pemberi utang merasa dirugikan maka sudah menjadi suatu kepastian bahwa pengadilan di akhirat kelak adalah pengadilan yang paling adil dan akan di ganti dengan ganjaran yang lebih besar dari apa yang kita tuntutan di

dunia. Disisi lain beliau juga mengingatkan bahwa Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berkenan membebaskan utang orang lain.⁶

2. Informan II

a. Biodata Informan

Nama : Tuan Guru. H. Muhammad Syarif Dibaj, Lc. M.Sy.

Umur : 43

Alamat : Jl. Sekumpul Gg.Taufik, No.53 E, Rt.01/Rw.01,
Kec. Martapura, Kab.Banjar

Pendidikan Terakhir : S2 IAIN Sultan Taha Jambi

Pekerjaan : Tenaga Pengajar

- Dosen Fakultas Syariah IAI Darussalam Martapura.
- Pengajar Madrasah Darul Ma'rifah Sekumpul Martapura
- Pengajar PP Darul Hijrah Martapura

Forum Kajian : Majelis Taklim

- Kajian Rutin Kampus IAI Darussalam Martapura, Hadis Ahkam Kitab Bulughul Maram.
- Majelis Taklim Masjid Al-Munawarah Sei. Landas, Kec.Karang Intan.

⁶Guru.H.Karimul Ulya, Pengajar Ma'had Aly Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 10 Desember 2024.

- Majelis Taklim Masjid Darul Muttaqien,
Kel.Komet, Banjarbaru
- Majelis Taklim Masjid Quba Banjarbaru

Kitab Yang di Kaji : Fikih

- At- Taqirrah As-Sadidah Karya Al-Habib Ahmad
Al-Kaff
- Nailu ar-Rajaa Karya Syaikh Salim bin Abdullah
bin Sumair Al-Hadrami

Organisasi Keislaman : -

b. Hasil Wawancara

Tuan Guru. H. M. Syarif Dibaj menyatakan bahwa seseorang yang memiliki utang meninggal dunia, maka utang tersebut tetap menjadi tanggung jawabnya, artinya status utang seseorang tidaklah gugur walaupun orang tersebut meninggal dunia. Akan tetapi beliau menambahkan bahwa jika seseorang yang memiliki utang benar-benar dalam keadaan tidak mampu untuk membayar utangnya, maka utang tersebut menjadi tanggungan Allah Swt. beliau menyampaikan bahwa di dalam persoalan utang-piutang Allah Swt menganjurkan kepada pemberi utang untuk memberi tenggang waktu kepada orang yang berutang sampai ia mampu untuk membayarnya. Tuan Guru H.M Syarif Dibaj mengutip potongan Surah Al-Baqarah/2:280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.”⁷

Ketika pemberi utang sudah memberikan tenggang waktu, lalu kemudian ternyata orang yang berutang meninggal dunia akan tetapi semasa hidupnya ia memiliki niat yang kuat untuk membayar utangnya namun benar-benar belum memiliki kemampuan membayar, maka pada keadaan seperti ini yang di maksud oleh Tuan Guru H. M. Syarif Dibaj bahwa utang tersebut menjadi tanggungan Allah Swt.

Pada saat seseorang meninggal dunia maka ahli waris berkewajiban melakukan penyelesaian utang dari harta peninggalan mayit, Tuan Guru H. M. Syarif Dibaj mencontohkan ketika seseorang meninggal dunia kemudian juga meninggalkan harta, maka ahli waris tidak boleh membagi harta mayit sebelum melunasi utang mayit tersebut, ketentuan ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan menurut syariat Islam.

Tanggung jawab ahli waris hanya melakukan pengurusan utang sesuai dengan jumlah harta yang di tinggalkan oleh mayit, selebihnya hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab ahli waris, akan tetapi beliau menambahkan jika dalam posisi yang menjadi ahli waris adalah anak, maka jika kita ingin menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tua, menanggung utangnya adalah merupakan suatu kebaikan agar jiwa mayit menjadi bebas dan tidak terkatung-katung.

⁷Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019).Juz 3, hal.62

Hukum menanggung hukum melakukan penanggungan utang adalah sunah, jika melihat status ahli waris sebagai penanggung utang maka kesunahannya menjadi lebih kuat, karena ahli waris merupakan kerabat dekat dari orang yang meninggal dunia. Alasan hukum beliau memberikan pendapat tersebut ialah dengan mengutip pandangan Imam An-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz 6 halaman 211.

Dalam aspek keadilan hukum, bagi pemberi utang dalam meminta pertanggung jawaban beliau menyarankan kepada pemberi utang untuk melihat kondisi ahli waris, karena jika ahli waris tergolong orang yang memiliki banyak harta tidak mungkin di dalam kekayaannya itu tidak terdapat andil dari orang tuanya. Disisi lain beliau juga menekankan kepada pemberi utang bahwa persoalan utang-piutang merupakan perbuatan yang dilakukan atas dasar prinsip tolong-menolong, adapun yang disebut dengan tolong-menolong haruslah disertai keikhlasan dan kerelaan, oleh karena itu alangkah bijaksananya jika pemberi utang berkenan membebaskan utang mayit, karena Allah Swt menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang mau membebaskan utang, yang mana membebaskan utang hukumnya sunah sedangkan memberi tempo pembayaran hukumnya wajib, namun pahala yang sunah lebih utama daripada yang wajib dalam kasus demikian. Disisi lain beliau juga mengatakan bahwa kalau memang merasa keberatan maka pemberi utang dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Dan jika hal tersebut

sulit dilakukan maka kasus yang demikian menjadi persoalan antara dia dengan Allah Swt. di akhirat.⁸

3. Informan III

a. Biodata Informan

Nama : Guru H. Muhammad Rusbani

Umur : 72 tahun

Alamat : Jl. Melati, Simp.3 Karang Intan, Kec. Karang Intan
Kab.Banjar

Pendidikan Terakhir : Aliyah Pondok Pesantren Darussalam

Pekerjaan : Tenaga Pengajar

- Pengajar Madrasah Darul Ma'rifah Sekumpul Martapura.
- Pengajar di Madrasah Darussalamah Bangun Jaya, Pesayangan, Martapura

Forum Kajian : Majelis Taklim

- Majelis di Rumah Desa Karang Intan
- Majelis Masjid Darul Ihsan, Desa Biih, Kec. Karang Intan
- Majelis Masjid Darul Iqomah Desa Loktangga, Kec. Karang Intan

⁸ Tuan Guru H. Muhammad Syarif Dibaj, Dosen IAI Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura 12 Desember 2024.

- Majelis Langgar Tamamul Aqillin, Desa Mali-mali, Kec. Karang Intan

Kitab Yang di Kaji : Fikih

- Fathul Qorib al-Mujib fi Syarhi Alfazh al-Taqrib Karya Syekh Ibnul Qasim al-Ghazi
- Hasyiyah al-Bajuri Karya Syekh Ibrahim al-Bajuri

Organisasi Keislaman :-

b. Hasil Wawancara

Ketika terdapat seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan utang maka utang tersebut tidaklah gugur bersama kematiannya, melainkan masih menjadi tanggungan dari mayit tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam riwayat Rasulullah Saw enggan menyolati jenazah yang meninggal dalam dalam keadaan membawa utang.

Seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang, dan ia memiliki harta peninggalan, maka harta tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli waris sebelum menyelesaikan kewajiban yang lain seperti, biaya penyelenggaraan jenazah, utang, zakat, dan wasiat. Dalam hal ini ahli waris hukumnya wajib melakukan pengelolaan terhadap harta peninggalan mayit untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban atau tanggungan mayit.

Dalam hal keadaan seseorang yang meninggal dunia meninggalkan utang dan tidak memiliki harta peninggalan atau memiliki harta namun hartanya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, maka Guru H. Muhammad Rusbani berpendapat bahwa ahli waris wajib menanggung hutang tersebut walaupun

menggunakan harta pribadinya, beliau beralasan bahwa ketentuan yang demikian akan memberikan keadilan bagi pemberi utang. Beliau juga mengingatkan kepada ahli waris mengenai kedudukan mayit bagi dirinya, baik itu dalam ikatan suami istri, saudara, orang tua, atau anak, yang artinya mengingat posisi kedudukan tersebut menjadikan langkah bijaksananya jika ahli waris menanggung utang mayit. Beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah Saw enggan menshalahkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung, beliau mengartikan bahwa penanggungan ini menjadi suatu kewajiban terlebih lagi bagi ahli waris yang di tinggalkan karena kedudukannya merupakan kerabat dekat mayit. Alasan lain beliau mengatakan bahwa ketika mayit memiliki harta, ahli waris memiliki hak waris, lalu ketika mayit meninggalkan utang maka sebiknya ia juga menanggungnya. Dalam istilahnya beliau mengatakan “*Jangan handak nyamannya haja*” (jangan hanya menginginkan yang enak saja).

Disisi lain beliau mengingatkan bagi orang yang berutang bahwa persoalan utang janganlah di anggap sebagai persoalan yang sederhana, memang berutang hukumnya adalah boleh namun dengan persyaratan yang ketat, baik mempertimbangkan kesanggupan untuk membayarnya nanti, keadaan yang menjadi alasan berutang apakah darurat atau tidak, dan pertimbangan lainnya. Jika mampu untuk tidak berutang maka sebaiknya jangan berutang kecuali dalam keadaan yang sangat darurat, sehingga memperkecil kemungkinan menjadi permasalahan di kemudian hari.⁹

⁹ Guru H. Muhammad Rusbani, Pengajar Darul Ma'rifah Martapura, *Wawancara Pribadi*, Karang Intan, 18 Desember 2024

4. Informan IV

a. Biodata Informan

- Nama : Guru H. Muhammad Zaki, Lc.
- Umur : 39 tahun
- Alamat : Desa Antasan Senior, Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
- Pendidikan Terakhir : S1 Universitas Al-Ahgaff Yaman
- Pekerjaan : Tenaga Pengajar
- Pondok Pesantren Darussalam Martapura
 - Pondok Pesantren Darul Ulum, Keraton Martapura
 - Madrasah Qiroat wa Tahqiq, Gg. Sanubari, Keraton Martapura
- Forum Kajian : Majelis Taklim.
- Majelis Taklim rutin PP. Darussalam Martapura.
 - Majelis Rutin Madrasah Qiroah wa Tahqiq
- Kitab Yang di Kaji : Fikih
- Fathul Muin karya Syekh Zainuddin al-Malibari
 - Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh al-Taqrib karya Syekh Ibnul Qasim al-Ghazi
 - Yaqut an-Nafis fi Madzhabi Ibni Idris karya Ahmad bin Umar asy-Syathiri
- Organisasi Keislaman : Komisi Dewan Fatwa MUI Kab. Banjar
- PC Nahdatul Ulama Kab. Banjar
- Forum Alumni HIMMAH

Forum Alumni Darussalam

b. Hasil Wawancara

Status utang orang yang meninggal dunia tidaklah gugur, hal ini dibuktikan dengan adanya hadis Rasulullah Saw yang enggan mensholati mayit yang memiliki tanggungan utang semasa hidupnya, artinya walaupun seseorang meninggal dunia maka ia tetap memiliki tanggungan utang tersebut.

Guru H. Muhammad Zaki, Lc., menjelaskan mengenai kewajiban ahli waris ketika seseorang meninggal dunia ialah melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan mayit. Terdapat lima hal yang harus di urus oleh ahli waris berkaitan dengan harta peninggalan mayit, pertama ialah biaya pengurusan jenazah, kedua utang mayit yang dilakukan dengan jaminan, ketiga utang mayit tanpa jaminan, keempat wasiat, dan kelima pembagian warisan. Pelaksanaan penunaian kewajiban ini dilakukan sesuai dengan urutannya, mulai dengan biaya pengurusan jenazah sampai pada pembagian warisan, artinya pembagian warisan baru dapat dilakukan apabila kewajiban-kewajiban sebelumnya sudah di selesaikan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila mayit memiliki harta peninggalan maka ahli waris berkewajiban melakukan pengurusan terhadap harta tersebut, kemudian apabila dalam hal seseorang meninggal dunia dan memiliki utang, akan tetapi harta yang ditinggalkan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang tersebut maka harta yang dimiliki di bayarkan seadanya kepada pemberi utang. Jika pemberi utang lebih dari satu pihak maka harta peninggalan yang ditinggalkan mayit di bagi berdasarkan persentase nilai tanggungan utang masing-masing pihak pemberi utang.

Dalam permasalahan ketika mayit tidak memiliki harta untuk membayar utangnya, maka dalam hal ini ahli waris tidak memiliki kewajiban menanggung utang tersebut, Guru H. Muhammad Zaki, Lc., menyampaikan bahwa hukum menanggung utang mayit adalah sunah, adapun alasan hukum yang beliau sampaikan ialah bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil umum sebagaimana pada persoalan kewajiban lainnya. Guru H. Muhammad Zaki, Lc., mengutip ayat Q.S. Al-An'am/6:164 mengenai dosa manusia yaitu,

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ ابْعِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁰

Beliau menjelaskan bahwa jika mayit memiliki dosa maka yang menanggung dosa tersebut adalah dirinya sendiri baik dalam keadaan hidup maupun mati, begitupun ketika mayit memiliki utang maka tanggungan utang yang menjadi kewajibannya, juga tetap menjadi kewajibannya sendiri ketika ia meninggal dunia.

Hukum yang tidak mewajibkan ahli waris menanggung utang mayit akan menimbulkan permasalahan bagi pihak pemberi utang, maka jika melihat posisi pemberi utang dalam aspek keadilan hukum, Guru H. Muhammad Zaki, Lc.,

¹⁰Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019) Juz 8, hal.204.

berpendangan bahwa permasalahan ini akan menjadi tanggungan mayit di akhirat dan akan diselesaikan di akhirat, akan tetapi beliau menyampaikan apabila menghendaki solusi maka ada kemungkinan hal ini bisa di selesaikan, yaitu misalnya melalui skema membayar utang mayit dengan menggunakan harta zakat melalui badan amil zakat seperti Baznas. Beliau berpendapat bahwa hal ini memungkinkan untuk dilakukan jika ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat menjadi salah satu *mustahik* (penerima) zakat, yang mana kemudian penerimaan dari harta zakat itu di gunakan untuk membayar utangnya, dengan catatan bahwa pemberi utang dapat membuktikan secara kuat baik dengan dokumen atau apapun yang bisa menjadi dasar dan menyatakan bahwa mayit memiliki utang kepadanya.¹¹

5. Informan V

a. Biodata Informan

Nama : Habib Ali Husein Al-Idrus
 Umur : 30 tahun
 Alamat : Jl. Pasar Papan, Kec. Martapura Timur, Kab. Banjar
 Pendidikan Terakhir : Aliyah Pondok Pesantren Darussalam
 Pekerjaan : Swasta
 Forum Kajian : Majelis Taklim
 - Kajian rutin Desa Tambak Baru, Kec. Astambul.
 Kitab Nihayatun Zein, dan Manhaju Sawiy

¹¹ Guru H. Muhammad Zaki, Pengajar Pondok Pesantren Darussalam Martapura, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 23 Desember 2024

- Kajian rutin di Simpang Empat, Kec. Pengaron
Wisahul Afroh, Sairus Shalikin
- Kajian Rutin di Desa Pambantanan Sungai Pinang
Baru, Kec. Sungai Tabuk
- Kajian di Kantor BKD Kalsel

Kitab Yang di Kaji : Fikih

- Fathul Muin karya Syekh Zainuddin al-Malibari
- Fathul Qarib al-Mujib fi Syarhi Alfazh al-Taqrib
karya Syekh Ibnul Qasim al-Ghazi
- Yaqut an-Nafis fi Madzhabi Ibni Idris karya Ahmad
bin Umar asy-Syathiri
- Safinah an-Najah karya Syekh Salim bin Sumair al-
Hadrami
- Matan Ghayah wa Taqrib karya Syekh Abu Syuja'
- Raudhat ath-Thalibin karya Imam Nawawi
- Al-Kanzu ar-Raghibin Karya Imam Jalaluddin al-
Mahally

Organisasi Keislaman : Lembaga Dakwah NU Kab Banjar

Lembaga Bahtsul Masail NU Kab.Banjar

b. Hasil Wawancara

Habib Ali Husein menyampaikan bahwa ada lima hal yang bergantung pada harta peninggalan mayit untuk di selesaikan yaitu penyelenggaraan jenazah, utang yang memiliki jaminan, utang yang tidak ada jaminan, wasiat, dan warisan. Dengan

demikian maka utang tetap menjadi tanggungan seseorang walaupun ia telah meninggal dunia.

Tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan mayit ialah melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Ahli waris berkewajiban mengurus harta peninggalan yang di tinggalkan oleh mayit, dengan menunaikan kewajiban mayit atas tanggungan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya sesuai urutannya, pertama mengeluarkan harta mayit untuk biaya penyelenggaraan jenazah, kedua ahli waris menunaikan utang mayit yang dilakukan dengan jaminan, ketiga ahli waris menunaikan utang mayit dengan mengumumkan kepada seluruh masyarakat atau mencari dokumen yang berkaitan dengan utang mayit, hal ini dilakukan dengan terus menerus dengan jangka waktu yang ditetapkan, keempat ahli waris menunaikan wasiat apabila mayit memiliki wasiat, kelima membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat.

Pada persoalan mayit tidak memiliki harta peninggalan atau memiliki namun tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka dalam hal ini ahli waris tidak berkewajiban untuk menanggung utang tersebut dari harta pribadinya, dan apabila ahli waris melakukan penanggungan utang mayit hukumnya adalah sunah. pendapat beliau ini didasarkan pada penjelasan ulama Syekh Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, dalam kitab al-Jami lil Ahkam al-Qur'an, Juz 5 halaman 230.

Dalam persoalan ini Habib Ali Husein menyampaikan bahwa ada dua masalah yang terjadi, pertama ketika harta yang ditinggalkan mayit tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, dan yang kedua ketika mayit tidak memiliki harta peninggalan untuk melunasi utangnya. Pada persoalan pertama ahli waris

tidak berkewajiban melunasi utang yang tersisa dengan harta pribadinya setelah dilakukan pembayaran dengan harta peninggalan mayit, dalam hal ini pembayaran utang dilakukan dengan membagi harta peninggalan mayit kepada para pemberi utang sesuai dengan persentase dari nilai utang mereka. Pada persoalan kedua ahli waris tidak berkewajiban sama sekali untuk menanggung utang mayit dari harta pribadinya.

Dalam pandangan kita secara sekilas maka hukum yang tidak mewajibkan ahli waris untuk menanggung utang mayit yang tidak memiliki harta peninggalan seakan-akan tidak adil bagi pihak pemberi utang, maka dalam hal ini Habib Ali Husein berpendapat bahwa Islam memberikan solusi, yaitu negara yang menanggung utang tersebut melalui harta zakat, atau orang kaya dengan menggunakan harta zakatnya, terlebih lagi jika ahli waris memiliki kelebihan harta kekayaan, walaupun ia tidak wajib menanggung utang mayit, akan tetapi apabila ia mengeluarkan zakat maka harta zakat itu wajib dikeluarkan untuk membayar utang mayit, karena status mayit dapat dikatakan sebagai salah satu penerima zakat yaitu *gharimin* (orang yang banyak utang). Skema penyelesaian yang demikian disampaikan berdasarkan penjelasan Imam Nawawi pada kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Jilid 6 halaman 211 cet. Al-Munirah Mesir. Walaupun dalam penjelasan di kitab tersebut terdapat dua pendapat, akan tetapi Habib Ali Husein lebih condong kepada pendapat yang membolehkan penggunaan harta zakat untuk membayar utang mayit, dikarenakan mayit tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu golongan penerima zakat yaitu *gharimin*. Dasar dari penjelasan ini ialah ayat yang

menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu Surah At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ فُلُؤُبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹²

Habib Ali Husein menjelaskan bahwa dari ayat tersebut menurut tata bahasa Arab kata *al-Gharimin* bersifat umum di karenakan terdapat *Alif Lam Jinsi* yang menyebabkan makna dari kata tersebut bersifat umum tanpa terkecuali, artinya zakat boleh diberikan kepada orang-orang yang memiliki utang baik hidup maupun sudah meninggal dunia. Dasar yang kedua ialah pada hukum asalnya bahwa menanggung utang orang yang telah meninggal dunia hukumnya boleh.

Mengenai konsep penanggungan yang dilakukan negara Habib Ali Husein menyampaikan bahwa dalam sebuah Hadits Riwayat Al-Bukhari Nomor 2298, Rasulullah Saw. bersabda:

أَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوِيَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ

“Aku lebih berhak menolong kaum Mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari kaum Mukminin yang meninggal, dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya...”¹³

¹²Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019) Juz 10, hal.269-270.

¹³Ibnu Hajar al-Ashqolani, *Fathul Bari’* (Darul Ma’rifah: Beirut, 1379 H) Juz 12, hal 10.

Habib Ali Husein menyampaikan bahwa dalam hadis tersebut Rasulullah Saw., berkedudukan sebagai kepala pemerintahan, sesuai konteksnya dalam pemerintahan terdapat lembaga Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga penyalur zakat di jaman dahulu, sehingga dapat menyalurkan harta zakat untuk menanggung utang mayit. Adapun jika kita kaitkan di jaman sekarang maka Baznas sebagai lembaga pengumpul zakat resmi yang dimiliki pemerintah dapat di jadikan sebagai lembaga yang representatif untuk melaksanakan hal tersebut. Dengan demikian maka menurut beliau jika kita melihat posisi pemberi utang dalam aspek keadilan hukum, maka Islam telah memiliki solusi dalam menyelesaikan masalah utang mayit ini sehingga dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.¹⁴

Penulis ini akan menyajikan data-data yang telah di uraikan di atas dalam bentuk matrik agar mudah untuk di pahami. Berikut ini adalah matrik penyajian data pembebanan utang pewaris kepada ahli waris menurut ulama Kabupaten Banjar:

Matrik 1

Tabel 3. 1 Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris

No	Informan	Kewajiban Ahli Waris (Alasan/ Dalil)
1.	Guru. H. Karimul Ulya	- Tanggung jawab ahli waris yaitu penyelenggaraan jenazah, penyelesaian utang (baik utang kepada Allah Swt,

¹⁴Habib Ali Husein Al-Idrus, Ketua Lembaga Dakwah NU Kab.Banjar, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 22 Desember 2024

		maupun kepada manusia), menunaikan wasiat, hak ahli waris.
2.	Tuan Guru. H. Muhammad Syarif Dibaj,Lc. M.Sy.	- Ketika seseorang meninggal dunia kemudian juga meninggalkan harta, maka ada lima hak-hak mayit yang harus ditunaikan ahli waris tidak boleh membagi harta mayit sebelum melunasi utang mayit tersebut, ketentuan ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan menurut syariat Islam.
3.	Guru H. Muhammad Rusbani	- Ahli waris hukumnya wajib melakukan pengelolaan terhadap harta peninggalan mayit untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban seperti biaya penyelenggaraan jenazah, utang, zakat dan wasiat.
4.	Guru H. Muhammad Zaki, Lc.	- Kewajiban ahli waris, pertama ialah biaya pengurusan jenazah, kedua utang mayit yang dilakukan dengan jaminan, ketiga utang mayit tanpa jaminan, keempat wasiat, dan kelima pembagian warisan.
5.	Habib Ali Husein Al-Idrus	- Ahli waris berkewajiban menunaikan kewajiban mayit pertama mengeluarkan harta mayit untuk biaya penyelenggaraan

		jenazah, kedua ahli waris menunaikan utang mayit yang dilakukan dengan jaminan, ketiga ahli waris menunaikan utang mayit, keempat ahli waris menunaikan wasiat apabila mayit memiliki wasiat, kelima membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat.
--	--	---

Matrik 2

Tabel 3. 2 Hukum Penanggungan Utang Pewaris Bagi Ahli Waris

No	Informan	Pendapat	Alasan/ Dalil
1.	Guru. H. Karimul Ulya	Sunah	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris yang melakukan penanggungan terhadap utang mayit, hukumnya adalah sunah - Berdasarkan Kitab <i>Syarah Nawawi ala Muslim</i> Juz 11 halaman 84, <i>Bughyatul Mustarsyidin</i> halaman 137-138, dan <i>I'anat ath-Thalibin</i> Juz 3 halaman 22, Alasan hukum demikian di dasari pada ketentuan bahwa seseorang tidak berkewajiban menanggung utang orang lain semasa hidup, maka demikian pula jika dalam keadaan meninggal dunia.

2.	Tuan Guru. H.Muhammad Syarif Dibaj, Lc. M.Sy.	Sunah	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab ahli waris hanya melakukan pengurusan utang sesuai dengan jumlah harta yang di tinggalkan oleh mayit. - Hukum melakukan penanggungan utang adalah sunah. Alasan hukumnya ialah dengan mengutip pandangan Imam An-Nawawi dalam Kitab <i>Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab</i>, Juz 6 halaman 211.
3.	Guru H. Muhammad Rusbani	Wajib	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris wajib menanggung hutang tersebut walaupun menggunakan harta pribadinya, dengan alasan bahwa ketentuan yang demikian akan memberikan keadilan bagi pemberi utang. - Berdasarkan pemahaman beliau pada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung. Alasannya, karena ketika mayit memiliki harta, ahli waris memiliki hak waris, lalu ketika mayit meninggalkan utang maka sebaiknya ia juga menanggungnya.

4.	Guru H. Muhammad Zaki, Lc.	Sunah	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris tidak memiliki kewajiban menanggung utang tersebut, beliau menyampaikan bahwa hukum menanggung utang mayit adalah sunah. - Berdasarkan dalil umum Ayat Al-Qur'an mengenai dosa manusia yaitu Q.S. Al-An'am/7:164, Jika mayit memiliki dosa maka yang menanggung dosa tersebut adalah dirinya sendiri baik dalam keadaan hidup maupun mati, begitupun ketika mayit memiliki utang maka tanggungan utang yang menjadi kewajibannya, juga tetap menjadi kewajibannya sendiri ketika ia meninggal dunia.
5.	Habib Ali Husein Al- Idrus	Sunah	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris tidak berkewajiban untuk menanggung utang tersebut dari harta pribadinya, dan apabila ahli waris melakukan penanggung utang mayit hukumnya adalah sunah, beliau menyampaikan bahwa ketentuana ini merupakan ijma para ulama.

Matrik 3

Tabel 3. 3 Aspek Keadilan Hukum Terhadap Pemberi Utang

No	Informan	Pandangan
1.	Guru. H. Karimul Ulya	<ul style="list-style-type: none"> - Apabila memang tidak dapat di selesaikan secara sosial maka pemberi utang dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut ahli waris - Cara kedua ialah pemberi utang melakukan pembebasan utang tersebut, karena Sesungguhnya Allah Swt merupakan Dzat yang Maha Adil, Allah memberikan ganjaran yang sangat besar bagi orang yang berkenan membebaskan utang orang lain, apa yang akan Allah tetapkan di akhirat nantinya adalah suatu ketetapan yang sangat adil.
2.	Tuan Guru H. Muhammad Syarif Dibaj, Lc. M.Sy.	<ul style="list-style-type: none"> - Jika ahli waris kaya, pemberi utang bisa menagih ke ahli waris. - Pemberi utang dapat membebaskan utang mayit, karena persoalan utang piutang adalah perbuatan yang dilandaskan dengan prinsip tolong menolong - Dapat melakukan gugatan ke pengadilan

3.	Guru H. Muhammad Rusbani	<ul style="list-style-type: none"> - Wajib di tanggung oleh ali waris dengan demikian akan memberi rasa keadilan bagi pemberi utang.
4.	Guru H. Muhammad Zaki, Lc.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi tanggung jawab mayit di akhirat, yang mana Allah Swt. yang akan menyelesaikan dengan keadilan-Nya. - Sebagai salah satu solusi maka dapat membayar utang mayit dengan menggunakan harta zakat melalui badan amil zakat seperti Baznas. Hal ini memungkinkan dilakukan jika ada dalil yang dapat dijadikan dasar bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat menjadi salah satu <i>mustahik</i> (penerima) zakat.
5.	Habib Ali Husein Al-Idrus	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam kasus seperti ini mayit dapat dikategorikan sebagai salah satu orang yang berhak menerima zakat oleh karena itu, solusi penyelesaian dapat dilakukan melalui harta zakat ahli waris, yang mana jika ahli waris mengeluarkan zakat, maka zakat tersebut digunakan untuk menyicil utang mayit. - Solusi kedua Negara yang membayar utang tersebut melalui harta zakat, yang mana dalam

		<p>hal ini lembaga yang representatif untuk melakukan hal tersebut ialah Baznas sebagai lembaga pengumpul zakat resmi yang dimiliki pemerintah dapat menyalurkan harta zakat untuk menanggung utang mayit.</p>
--	--	--

B. Analisis

Analisis hasil temuan ini diperuntukan untuk menjawab pokok bahasan rumusan masalah yaitu Pembebanan utang pewaris kepada ahli waris menurut ulama Kabupaten Banjar beserta dalil dan alasan yang mendasari pendapat tersebut.

1. Hukum Pembebanan Utang Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Ulama Kabupaten Banjar

Salah satu tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan mayit adalah menggunakannya untuk menyelesaikan utang yang dimiliki mayit. Persoalan utang-piutang ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat bahwa bagaimanapun perihal utang adalah perihal yang harus ditunaikan, karena ketika terjadi suatu kegiatan utang-piutang maka disitu akan memunculkan hak dan kewajiban antara orang yang berutang dengan orang yang memberi utang, orang yang berutang memiliki kewajiban untuk membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan, sementara orang yang memberikan utang juga memiliki hak untuk menagih utang tersebut.

Dalam Islam sendiri orang yang memberikan pinjaman kepada orang lain dipandang sebagai perbuatan yang mulia, karena memberikan pinjaman kepada

orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan tolong-menolong, yang mana perbuatan saling menolong sangat dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT, dalam potongan ayat Q.S. Al-Maidah/5:2) yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”¹⁵

Yang menjadi persoalan adalah ketika seseorang yang memiliki utang kemudian meninggal dunia, padahal dalam hadisnya Rasulullah SAW. memberikan peringatan bahwa jangan sampai umat muslim meninggal dalam keadaan memiliki utang, karena utang dapat menjadi penghalang seseorang untuk masuk surga, sebagaimana H.R. Ahmad Nomor 10194 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَحْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَرَالُ نَفْسُ ابْنِ آدَمَ مُعَلَّقَةً بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَىٰ عَنْهُ

“Telah menceritakan kepada kami Yazid, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami Zakaria bin Abu Za`idah dari Sa'd bin Ibrahim dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jiwa anak Adam akan senantiasa tergantung dengan tanggungan utangnya sehingga dibayar.”¹⁶

Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa Islam menaruh perhatian yang lebih dalam persoalan utang-piutang ini, sehingga seseorang yang memiliki utang sangat diharuskan untuk melunasi utangnya.

¹⁵Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019) Juz 6, hal.144.

¹⁶https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/10194 (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021 pukul 20:00 WITA.)

Dalam Islam ketika seseorang meninggal dunia dan ia memiliki harta peninggalan atau dalam bidang ilmu kewarisan dikenal dengan istilah *tirkah*. Sebelum harta peninggalan itu dibagikan kepada para ahli waris, maka dari harta tersebut haruslah dikurangi dulu dengan biaya pengurusan jenazah (*tahjizul mayit*), pelunasan utang-utang, dan juga wasiat dari pewaris jika ada, sisa dari harta itulah yang kemudian disebut dengan harta warisan dan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.

Permasalahan terjadi ketika seseorang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan harta namun memiliki utang atau meninggalkan harta namun jumlahnya tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka muncul pertanyaan apakah ahli waris berkewajiban untuk melunasi utang-utang mayit tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti yakni dari lima informan Ulama Kabupaten Banjar, berkenaan dengan pembebanan utang pewaris terhadap ahli waris terdapat perbedaan pendapat dimana empat informan menyatakan bahwa hukum pembebanan tersebut adalah sunah. Informan yang berpendapat bahwa hukum pembebanan utang pewaris terhadap ahli waris adalah sunah diantaranya, Informan (I) Guru H. Karimul Ulya, beliau berpendapat apabila seseorang ketika semasa hidupnya memiliki utang namun ia benar-benar tidak memiliki harta untuk membayarnya, akan tetapi di dalam hatinya tertanam tekad yang kuat dengan niat ingin membayar utang-utangnya, maka dalam hal demikian utang tersebut tidak akan menjadi persoalan di alam akhirat dikarenakan Allah Swt yang akan menanggungnya. Beliau menyampaikan pandangan tersebut dengan mengutip

pendapat di dalam Kitab *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu* Juz 2 halaman 1482 yang mana dalam kitab tersebut disampaikan hadis Rasulullah Saw, di antaranya yang diriwayatkan oleh Abi Umamah:

مَنْ دَانَ بَدَيْنٍ فِي نَفْسِهِ وَفَأُوهُ وَمَاتَ تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَىٰ عَرِيْمَهُ بِمَا شَاءَ وَمَنْ دَانَ بَدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَأُوهُ وَمَاتَ إِقْتَصَرَ اللَّهُ لِعَرِيْمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Barang siapa yang berutang dan didalam dirinya terdapat niat untuk melunasinya, kemudian ia meninggal dunia, maka Allah Swt akan mengampuninya dan meridhainya dengan apa yang Allah Swt kehendaki”.¹⁷

Dalam hal mayit meninggalkan harta namun tidak mencukupi untuk membayar utangnya atau bahkan ketika mayit tidak meninggalkan harta sekalipun, maka tanggung jawab ahli waris dalam menyelesaikan persoalan utang mayit hanya terbatas pada jumlah harta peninggalan yang dimiliki, dan mengusahakan untuk meminta pembebasan utang terhadap mayit tersebut kepada pemberi utang. Adapun mengenai bagaimana hukum jika ahli waris atas kesadaran dan kehendak pribadinya melakukan penanggungan terhadap utang mayit, maka hal tersebut hukumnya adalah sunah, yang artinya bukan merupakan kewajiban bagi ahli waris. Tindakan yang demikian merupakan suatu kebaikan dan sah untuk dilakukan, status utang mayit tersebut kemudian dapat dinyatakan lunas. Pendapat beliau disampaikan dengan menjelaskan pandangan ulama dalam Kitab *Syarah Nawawi ala Muslim* Juz 11 halaman 84, *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 137-138, dan *I'anat ath-Thalibin* Juz 3 halaman 22, Alasan hukum demikian di dasari pada ketentuan bahwa seseorang tidak berkewajiban menanggung utang orang lain semasa hidup, maka demikian pula jika dalam keadaan meninggal dunia.

¹⁷Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh* (Damaskus: Darul Fikr, 1418 H) Juz 2 halaman 1482.

Informan (II) Tuan Guru. H. Muhammad Syarif Dibaj, Lc. M.Sy., juga berpendapat bahwa tanggung jawab ahli waris hanya melalukan pengurusan utang sesuai dengan jumlah harta yang di tinggalkan oleh mayit, selebihnya hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab ahli waris, akan tetapi beliau menambahkan jika dalam posisi yang menjadi ahli waris adalah anak, maka jika kita ingin menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada orang tua, menanggung utangnya adalah merupakan suatu kebaikan agar jiwa mayit menjadi bebas dan tidak terkatung-katung.

Hukum melakukan penanggungan utang adalah sunah, jika melihat status ahli waris sebagai penanggung utang maka kesunahannya menjadi lebih kuat, karena ahli waris merupakan kerabat dekat dari orang yang meninggal dunia. Berdasarkan pendapat Imam An-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzab*, Juz 6 halaman 211.

Informan (IV) Guru H. Muhammad Zaki, Lc berpendapat bahwa hukum menanggung utang mayit adalah sunah, adapun alasan hukum yang beliau sampaikan ialah bahwa dalam hal ini berdasarkan dalil umum sebagaimana pada persoalan kewajiban lainnya. Beliau mengutip ayat Q.S. Al-An'am/6:164 mengenai dosa manusia yaitu,

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أِنِّغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهِهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اٰخَرٰى ۗ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Apakah aku (pantas) mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap orang yang berbuat dosa, dirinya sendirilah yang akan bertanggung jawab. Seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian, kepada Tuhanmulah kamu-

kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”¹⁸

Beliau menjelaskan bahwa jika mayit memiliki dosa maka yang menanggung dosa tersebut adalah dirinya sendiri baik dalam keadaan hidup maupun mati, begitupun ketika mayit memiliki utang maka tanggungan utang yang menjadi kewajibannya, juga tetap menjadi kewajibannya sendiri ketika ia meninggal dunia. Demikian pula informan (V) Habib Ali Husein Al Idrus, berpendapat bahwa pada persoalan mayit tidak memiliki harta peninggalan atau memiliki namun tidak mencukupi untuk melunasi utangnya, maka dalam hal ini ahli waris tidak berkewajiban untuk menanggung utang tersebut dari harta pribadinya, dan apabila ahli waris melakukan penanggungan utang mayit hukumnya adalah sunah.

Empat dari lima orang Ulama Kabupaten Banjar yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa hukum ahli waris menggunakan harta pribadinya untuk menanggung utang pewaris yang tidak memiliki harta atau memiliki namun tidak cukup untuk melunasi utangnya adalah sunah, yang artinya bukan merupakan kewajiban dari ahli waris.

Pendapat yang telah di utarakan empat informan tersebut bersesuaian dengan konsep penanggungan utang atau yang disebut dengan *kafalah* dalam Islam. Penanggungan utang mayit ialah sama halnya dengan *kafalah* yaitu, pemberian jaminan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak yang lain, dimana pemberi jaminan juga bertanggung jawab atas pembayaran suatu utang yang menjadi hak

¹⁸Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019) Juz 8, hal.204.

penerima jaminan, namun penerima jaminan lebih khusus dilakukan untuk utang orang yang telah meninggal dunia.

Dasar hukum penanggungan utang mayit ialah berdasarkan Hadis Rasulullah Saw. yaitu H.R. Bukhari Nomor 2131 dari Salmah Ibn al-Akwa' r.a.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

“Bahwasanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para shahabat) menjawab: Tidak, Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapkan jenazah yang lain. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kepada para shahabat: Shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu.”¹⁹

Dalam hadis tersebut di jelaskan bahwa pernah ada seorang sahabat nabi yaitu Abu Qatadah yang melakukan penanggungan utang terhadap seseorang sahabat nabi lainnya yang telah meninggal dunia saat hendak di sholatkan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penanggungan utang mayit pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Para ulama bersepakat untuk memperbolehkan akad *kafalah*, kebolehan akad *kafalah* ini dalam Islam didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan mandat bagi orang yang berhutang. Para ulama juga sepakat

¹⁹ https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2131 di akses pada 12 Oktober 2024, pukul 12.10 WITA.

dengan bolehnya *kafalah* ini karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat. *Kafalah* haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas sehingga bernilai ibadah yang berbuah pahala.²⁰

Para Ulama juga berpendapat bahwa jika terdapat seseorang yang meninggal dunia, dan ia mempunyai beban utang, maka tidak wajib bagi walinya atau ahli warisnya membayarkan utang tersebut dengan hartanya. Akan tetapi jika ia membayarkan utang itu maka ini merupakan perbuatan yang sunah. Sebagaimana pendapat Syekh Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi, Ibnu Qudamah, Al-Qurtubi, dan lain-lain.

Adapun informan (III) memiliki perbedaan pendapat dengan empat informan lain dimana dalam hal keadaan seseorang yang meninggal dunia meninggalkan utang dan tidak memiliki harta peninggalan atau memiliki harta namun hartanya tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya, maka informan (III) berpendapat bahwa ahli waris wajib menanggung hutang tersebut walaupun menggunakan harta pribadinya, beliau beralasan bahwa ketentuan yang demikian akan memberikan keadilan bagi pemberi utang. Beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah Saw enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung, beliau mengartikan bahwa penanggungan ini menjadi suatu kewajiban terlebih lagi bagi ahli waris yang di tinggalkan karena kedudukannya merupakan kerabat dekat mayit. Alasan lain beliau mengatakan bahwa ketika mayit memiliki harta, ahli waris memiliki hak waris, lalu ketika mayit

²⁰Abdullah bin Muhammad At-Thayar, *Enslkopedi fiqh muamalah dalam Pandangan empat madzhab* (Yogyakarta,Maktabah al-hanif,2009) hlm. 188.

meninggalkan utang maka sebiknya ia juga menanggungnya. Dalam istilahnya beliau mengatakan “*Jangan handak nyamannya haja*” (jangan hanya menginginkan yang enak saja).

Berdasarkan berbagai pandangan Ulama Kabupaten Banjar tersebut penulis sependapat dengan pandangan informan yang mengatakan bahwa penanggung utang mayit hukumnya adalah sunah, mereka juga berpendapat bahwa ahli waris tidak diwajibkan untuk membayarkan utang pewaris menggunakan harta pribadinya. Namun jika mereka dengan keikhlasan membayar utang pewaris, hal tersebut hukumnya adalah sunah, yang artinya bukan merupakan kewajiban bagi ahli waris. Tindakan yang demikian merupakan suatu kebaikan dan sah untuk dilakukan, status utang mayit tersebut kemudian dapat dinyatakan lunas.

Adapun informan (III) memandang wajib didasarkan kepada hadis Rasulullah Saw yang enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung, beliau mengartikan bahwa penanggung ini menjadi suatu kewajiban terlebih lagi bagi ahli waris yang di tinggalkan karena kedudukannya merupakan kerabat dekat mayit.

Pendapat yang beliau sampaikan memiliki perbedaan dengan informan lain dalam hal penarikan hukumnya, bagi penulis pada dasarnya seseorang tidak berkewajiban menanggung utang orang lain semasa hidup, maka demikian pula jika dalam keadaan meninggal dunia. Jika yang menjadi alasan bahwa kedudukan ahli waris dalam persoalan ini sebagai kerabat dekat dari mayit maka tetap hukumnya adalah sunah, walaupun dengan adanya posisi tersebut membuat mereka merasa

perlu menanggung utang mayit, maka ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sangat baik, namun tidak merubah hukumnya menjadi suatu kewajiban.

2. Aspek Keadilan Hukum Bagi Pemberi Utang Menurut Ulama Kabupaten Banjar

Para ulama bersepakat untuk memperbolehkan akad kafalah, kebolehan akad kafalah ini dalam Islam didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan mandat bagi orang yang berhutang. Para ulama juga sepakat dengan bolehnya kafalah ini karena sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat. Kafalah haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas sehingga bernilai ibadah yang berbuah pahala.

Para Ulama juga berpendapat bahwa jika terdapat seseorang yang meninggal dunia, dan ia mempunyai beban utang, maka tidak wajib bagi walinya atau ahli warisnya membayarkan utang tersebut dengan hartanya. Akan tetapi jika ia membayarkan utang itu maka ini merupakan perbuatan yang sunah.

Bagaimana aspek keadilan hukum bagi pemberi utang jika hukum melunasi utang pewaris bukanlah merupakan kewajiban ahli waris sementara pewaris tidak memiliki harta peninggalan untuk melunasi utangnya.

Informan (I) mengatakan bahwa apabila memang tidak dapat di selesaikan secara sosial maka pemberi utang dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut ahli waris, akan tetapi jika memang hal tersebut sulit untuk dilakukan, baik karena status utang yang tidak jelas karena tidak ada saksi atau bukti tertulis maka beliau menegaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt merupakan Dzat yang Maha Adil, jika memang pemberi utang merasa dirugikan maka sudah menjadi suatu kepastian

bahwa pengadilan di akhirat kelak adalah pengadilan yang paling adil dan akan di ganti dengan ganjaran yang lebih besar dari apa yang kita tuntut di dunia. Informan (II) juga berpendapat bahwa pemberi utang dapat melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Dan beliau juga mengatakan bahwa persoalan utang piutang ini pada prinsipnya adalah tolong-menolong yang harusnya disertai keikhlasan dan kerelaan, oleh karena itu alangkah bijaksananya jika pemberi utang berkenan membebaskan utang mayit. Sedangkan informan (IV) berpendapat bahwa permasalahan ini akan menjadi tanggungan mayit di akhirat dan akan diselesaikan di akhirat, akan tetapi beliau menyampaikan apabila menghendaki solusi maka ada kemungkinan hal ini bisa di selesaikan, yaitu misalnya melalui skema membayar utang mayit dengan menggunakan harta zakat apabila ada dalil yang bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hal tersebut. Informan (V) juga berpendapat bahwa permasalahan ini akan menjadi tanggungan mayit di akhirat apabila tidak diselesaikan, dalam hal ini hukum Islam telah memberikan solusi bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat dikategorikan sebagai salah satu penerima zakat. Terdapat dua skema penyelesaian yaitu menggunakan harta zakat yang dikeluarkan oleh ahli waris untuk membayar utang mayit, dan yang kedua dengan skema penanggungan dilakukan oleh Negara menggunakan harta zakat masyarakat melalui badan amil zakat yang representatif mewakili Negara dalam pengelolaan dana zakat seperti Baznas maupun lembaga lainnya.

Sementara informan (III) memiliki pendapat yang berbeda dengan informan lain dimana beliau berpendapat bahwa ahli waris wajib menanggung hutang tersebut walaupun menggunakan harta pribadinya, beliau beralasan bahwa

ketentuan yang demikian akan memberikan keadilan bagi pemberi utang. Beliau juga menyampaikan bahwa Rasulullah Saw enggan menshalatkan jenazah yang memiliki utang sampai utangnya tersebut di tanggung, beliau mengartikan bahwa penanggungan ini menjadi suatu kewajiban terlebih lagi bagi ahli waris yang di tinggalkan karena kedudukannya merupakan kerabat dekat mayit. Alasan lain beliau mengatakan bahwa ketika mayit memiliki harta, ahli waris memiliki hak waris, lalu ketika mayit meninggalkan utang maka sebiknya ia juga menanggungnya. Dalam istilahnya beliau mengatakan “*Jangan handak nyamannya haja*” (jangan hanya menginginkan yang enaknja saja). Beliau juga mengingatkan bagi orang yang berutang bahwa persoalan utang janganlah di anggap seabagai persoalan yang sederhana, memang berutang hukumnya adalah boleh namun dengan persyaratan yang ketat, baik mempertimbangkan kesanggupan untuk membayarnya nanti, keadaan yang menjadi alasan berutang apakah darurat atau tidak, dan pertimbangan lainnya. Jika mampu untuk tidak berutang maka sebaiknya jangan berutang kecuali dalam keadaan yang sangat darurat.

Menganalisis berbagai pendapat tentang aspek keadilan hukum terhadap pemberi utang menurut Ulama Kabupaten Banjar, penulis sejalan dengan para informan yang berpendapat bahwa hukum penangunan utang mayit adalah sunah, dan apabila tidak ada seseorang yang menanggungnya maka utang tersebut menjadi urusan mayit dengan pemberi utang di akhirat kelak, walaupun bagi ahli waris mereka sangat disunahkan apabila berkenan menanggung utang mayit.

Dalam penyelesaian persoalan untuk memberikan rasa keadilan bagi pemberi utang tidak dapat dilakukan dengan serta merta mewajibkan ahli waris

untuk menanggung utang yang ditinggalkan mayit, karena dalam suatu kaidah fikih dikatakan bahwa:

الضَّرُّ لَا يُزَالُ بِالضَّرِّ

“Sesuatu yang mudharat tidak dapat dihilangkan dengan yang mudharat”.²¹

Apabila dikaitkan dengan persoalan ini maka mudharat bagi pemberi utang tidak dapat di tutupi dengan mudharat yang mungkin terjadi pada ahli waris apabila ia diwajibkan membayar utang mayit.

Dalam persoalan ini setidaknya terdapat beberapa cara yang bisa menjadi solusi penyelesaiannya, yang pertama dengan cara kekeluargaan dimana ahli waris meminta kerelaan pemberi utang untuk memberi tempo pelunasan utang atau bahkan membebaskan mayit dari utang-utangnya tersebut, karena Allah swt menjanjikan ganjaran yang sangat besar bagi mereka yang mau membebaskan utang saudaranya, hal ini menunjukkan bahwa Allah swt. sangat adil terhadap hambanya dengan memberi ganjaran atas kebaikan yang dilakukan. Kedua, apabila memang tidak dapat di selesaikan secara sosial dan merasa dirugikan maka pemberi utang dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut ahli waris secara perdata di pengadilan untuk melakukan pembayaran utang tersebut, sehingga dengan keputusannya nanti diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Ketiga, hukum Islam juga telah memberikan solusi dalam penyelesaian persoalan ini melalui skema penyaluran harta zakat.

²¹Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015) Cet.1, hal.111

Dalam konsep penyaluran harta zakat ini terdapat beberapa skema yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan utang mayit, terlebih dahulu yang perlu kita sepakati bahwa orang yang memiliki banyak utang (*gharim*) merupakan salah satu *mustahik* (penerima) zakat, sebagai mana dikatakan dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²²

Skema yang pertama yaitu di selesaikan menggunakan harta zakat secara pribadi, pada konsep yang demikian persoalannya kemudian adalah apakah orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat dikategorikan menjadi penerima zakat, dalam hal ini ulama berbeda pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang tidak dapat dikategorikan menjadi penerima zakat, ini merupakan pendapat dari Mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, hal tersebut dikarenakan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki utang tidak dapat melakukan serah terima dalam prosesi zakat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa orang yang

²²Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT Kementerian Agama RI, 2019) Juz 10, hal.269-270

meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat dikategorikan sebagai penerima zakat, ini merupakan pendapat dari Mazhab Maliki.²³

Dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut maka penyelesaian masalah ini dapat dilakukan dengan cara ahli waris mengambil alih tanggung jawab utang mayit, baru kemudian ahli waris tersebut dapat di kategorikan sebagai orang yang menanggung utang dan berhak menerima zakat, sehingga nantinya harta zakat yang ia peroleh dapat digunakan untuk membayar utang mayit yang ia tanggung. Dalam hal ini keempat ulama mazhab memperbolehkannya.

Adapun apabila meyakini pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki utang dapat dikategorikan sebagai penerima zakat maka dapat dilakukan dengan cara apabila ahli waris memiliki kelebihan harta maka pembayaran utang mayit dapat diambil dari harta zakat ahli warisnya sendiri, jika ahli warisnya juga tergolong tidak mampu maka ia dapat berupaya mengumpulkan harta zakat dari orang lain untuk membayar utang mayit tersebut.

Skema yang kedua ialah penanggungan utang mayit yang dilakukan oleh negara, hal ini di dasarkan pada sabda Rasulullah Saw. dalam H.R. Bukhari Nomor 2298 yang berbunyi:

أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوِّبِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ

²³Muhammad bin Ahmad bin Arafah ad-Dasuqi, *Asy Syarh al-Kabir ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Darul Fikr: Beirut, tt) Juz 1, hal.496.

“Aku lebih berhak menolong kaum Mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari kaum Mukminin yang meninggal, dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya...”²⁴

Dengan skema ini baik mayit maupun ahli warisnya yang dikategorikan sebagai *gharim*, menjadikannya berhak menerima zakat, sehingga negara kemudian membayar tanggungan utangnya dengan menggunakan harta zakat, hal ini sebenarnya dapat dilakukan oleh lembaga yang menjadi representasi dari pemerintah dalam pengelolaan zakat seperti halnya Baznas.

²⁴Ibnu Hajar al-Ashqolani, *Fathul Bari'* (Darul Ma'rifah: Beirut, 1379 H) Juz 12, hal 10.